



**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE HOUSE RETRIBUTIONS
ON INCREASING REGIONAL REVENUES IN BARRU DISTRICT**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMASUKAN RETRIBUSI RUMAH DINAS
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN BARRU**

A.Ariyadi
aariyadi@algazali.ac.id
STIA Al Gazali Barru
A.Aminah
STIA Al Gazali Barru
aaminah@algazali.ac.id
Mukmin Muhammad
STIA Al Gazali Barru
mukmin@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the contribution of official housing retribution on increasing regional income in Barru District and the inhibiting factors in managing the official housing retribution in Barru District. Data sources were obtained by means of questionnaires, interviews, and observations. The data analysis method used is parametric inferential statistical techniques (Regression Analysis-SPSS). The results of the study using SPSS showed that the effectiveness of the contribution of the income from the official housing retribution to the increase in regional income in Barru Regency had no significant effect where the results of the simultaneous Hypothesis test (F test) and T test (partial) showed a significance of <0.05 , which was 0.781 and the factors which affects the effectiveness of the inclusion of official housing retribution on local revenue is the lack of building maintenance while the supporting factors include awareness of service users, human resources collectors and easy access.

Keywords: *Effectiveness of official housing income and regional income.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kontribusi pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Barru dan faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan retribusi rumah dinas di Kabupaten Barru. Sumber data diperoleh dengan cara angket, wawancara, observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik statistik inferensial parametrik (Analisis Regresi-SPSS). Hasil penelitian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa efektivitas kontribusi pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Barru tidak berpengaruh signifikan dimana hasil uji Hipotesis (uji F) simultan dan uji T (parsial) menunjukkan signifikansi $<0,05$ yaitu sebesar 0,781 dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap pendapatan asli daerah adalah kurangnya pemeliharaan bangunan sedang faktor yang mendukung meliputi kesadaran pengguna jasa, Sumber Daya Manusia kolektor dan akses yang mudah dijangkau.

Kata Kunci : Efektivitas pemasukan rumah dinas dan Pendapatan Daerah.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Sejak awal terbentuknya, Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan,

(4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber Penerimaan Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah; dan
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah.

Berdasarkan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi rumah dinas. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi rumah dinas ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Retribusi rumah dinas ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Keberadaan pelayanan ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri. Pelayanan publik sebagai indikator utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikelola dengan baik, karena pengelolaan retribusi rumah dinas tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang diberikan. Namun pada kenyataannya, efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas selama ini belum sepenuhnya dapat mendongkrak pendapatan asli daerah, rumah dinas di Kabupaten Barru masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pegawai yang menempati rumah dinas tersebut. Kondisi-kondisi yang ada pada rumah dinas saat ini misalnya; masih kurangnya pemeliharaan dari para pegawai yang menempati rumah dinas tersebut, tidak terpeliharanya rumah dinas tersebut pasca ditinggalkan pindah

oleh penyewa sebelumnya sehingga terkesan semrawut yang menyebabkan penyewa tidak berminat untuk menyewa rumah dinas tersebut.

Efektivitas Pemasukan Rumah Dinas

Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien. Efektivitas yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan retribusi rumah dinas di Kabupaten Barru dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator untuk menilai keberhasilan pajak atau retribusi daerah, yaitu:

- a. Hasil pemungutan pajak yang memadai
- b. Adil secara horisontal dan vertikal
- c. Berdaya guna secara ekonomi
- d. Dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

Penulis akan melakukan penelitian dari periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Pada saat melakukan penelitian, penulis memperoleh informasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Barru.

3. Otonomi Daerah

Sejak masa pemerintahan sebelum reformasi, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya merupakan hubungan dalam kehidupan ketatanegaraan. Pola hubungan seperti ini pada perkembangannya mengalami ketimpangan karena kecenderungan pusat melakukan pemerasan terhadap kekayaan

di daerah. Ketimpangan yang demikian menjadi pemicu sentimen daerah untuk menuntut keleluasaan mengatur dan mengurus daerahnya dalam kemasannya otonomi daerah.

Menurut Sarundajang (2012:74) otonomi pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya yang lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, dan suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. Pada dasarnya posisi kebijakan otonomi sebagai seluruh proyek pengembalian harga diri pemerintah dan masyarakat daerah diharapkan dapat menjadi solusi yang kreatif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di daerah. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

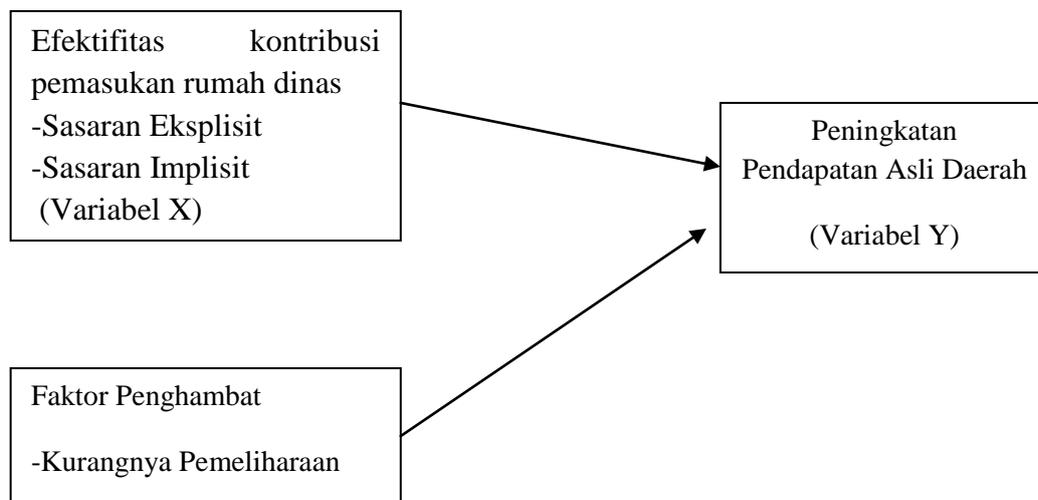
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas selama ini belum sepenuhnya dapat mendongkrak pendapatan asli daerah, rumah dinas di Kabupaten Barru masih terdapat permasalahan-permasalahan mengenai kondisi-kondisi fisik maupun non fisik yang membutuhkan penanganan segera dari

pemerintah yang tentunya dengan dukungan dari para pegawai yang menempati rumah dinas tersebut. Kondisi-kondisi yang ada pada rumah dinas saat ini misalnya; masih kurangnya pemeliharaan dari para pegawai yang menempati rumah dinas tersebut, tidak terpeliharanya rumah dinas tersebut pasca ditinggalkan pindah oleh penyewa sebelumnya sehingga terkesan semrawut yang menyebabkan penyewa tidak berminat untuk menyewa rumah dinas tersebut.

Kerangka Pikir

Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir ini, akan peneliti sajikan dalam bentuk gambar, seperti dibawah ini

BAGAN KERANGKA PIKIR



C. Hipotesis Penelitian

H0 : Efektifitas Pemasukan retribusi rumah dinas berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

H1 : Efektifitas Pemasukan retribusi rumah dinas tidak berpengaruh berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2000:201)

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemakai jasa (penghuni) rumah dinas Pemda Kabupaten Barru baik yang berstatus ASN maupun honorer sebanyak 180 orang

2.Sampel

Sampel adalah “sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono,2012:210). Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu keseluruhan populasi menjadi sampel.sebanyak 180 orang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pendapatan Daerah

Tabel 1

Tanggapan Responden Tentang Kolektor Yang Bertugas Dalam Penagihan Retribusi Bersikap Sopan

No	Tanggapan Responden	Bobot	F	Nilai	%
1	Sangat Setuju	5	31	155	17,2
2	Setuju	4	66	264	36,7
3	Ragu-Ragu	3	83	249	46,1
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		180	668	100
	Rata-rata skor/persentase			3,71	74,2

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel diatas terkait tanggapan dari 180 responden tentang Kolektor yang bertugas dalam penagihan retribusi bersikap sopan, yakni 31 responden atau 17,2 % memberikan penilaian sangat setuju, selanjutnya terdapat 66 responden atau 36,7 % yang memberikan penilaian Setuju. Selanjutnya terdapat 83 responden atau 46,1 % yang memberikan penilaian Ragu-ragu. Selanjutnya tidak ada yang memberikan penilaian Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa nilai rata-rata dari tanggapan responden mencapai 3,71 % atau 74,2 %.

Tabel 2
Tanggapan Responden Tentang Pemberian Bukti Pembayaran Retribusi Oleh Kolektor

No	Tanggapan Responden	Bobot	F	Nilai	%
1	Sangat Setuju	5	26	130	14,5
2	Setuju	4	123	492	68,3
3	Ragu-Ragu	3	31	93	17,2
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		180	715	100
	Rata-rata skor/persentase			3,97	79,4

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel diatas terkait tanggapan dari 180 responden tentang Pemberian bukti pembayaran retribusi dari kolektor, yakni 26 responden atau 14,5 % memberikan penilaian sangat setuju, selanjutnya terdapat 123 responden atau 68,3 % yang memberikan penilaian Setuju. Selanjutnya terdapat 31 responden atau 17,2 % yang memberikan penilaian Ragu-ragu. Selanjutnya tidak ada yang memberikan penilaian Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa nilai rata-rata dari tanggapan responden mencapai 3,97 % atau 79,4 %.

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Pembayaran Retribusi

No	Tanggapan Responden	Bobot	F	Nilai	%
1	Sangat Setuju	5	31	155	17,2
2	Setuju	4	66	264	36,7
3	Ragu-Ragu	3	83	249	46,1
4	Tidak Setuju	2	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		180	668	100
	Rata-rata skor/persentase			3,71	74,2

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel diatas terkait tanggapan dari 180 responden tentang ketepatan pembayaran retribusi, yakni 31 responden atau 17,2 % memberikan penilaian sangat setuju, selanjutnya terdapat 66 responden atau 36,7 % yang memberikan penilaian Setuju. Selanjutnya terdapat 83 responden atau 46,1 % yang memberikan penilaian Ragu-ragu. Selanjutnya tidak ada yang memberikan penilaian Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa nilai rata-rata dari tanggapan responden mencapai 3,71 % atau 74,2 %.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Jarak Yang Cukup Dekat Dengan Instansi Tempat Kerja

No	Tanggapan Responden	Bobot	F	Nilai	%
1	Sangat Setuju	5	0	0	0
2	Setuju	4	118	472	65,6
3	Ragu-Ragu	3	40	120	22,2
4	Tidak Setuju	2	22	44	12,2
5	Sangat Tidak Setuju	1	0	0	0
	Jumlah		180	636	100
	Rata-rata skor/persentase			3,53	70,6

Sumber : Hasil olah data, 2022

Berdasarkan tabel diatas terkait tanggapan dari 180 responden tentang, Jarak yang cukup dekat dengan instansi tempat kerja yakni tidak ada responden yang memberikan penilaian sangat setuju, selanjutnya terdapat 118 responden atau 65,6 % yang memberikan penilaian Setuju. Selanjutnya terdapat 40 responden atau 22,2 % yang memberikan penilaian Ragu-ragu. Selanjutnya 22 responden atau 12,2 % yang

memberikan penilaian tidak setuju dan tidak ada responden memberikan penilaian Sangat Tidak Setuju.

Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa nilai rata-rata dari tanggapan responden mencapai 3,71 % atau 74,2 %.

Pembahasan

a. Hasil Uji Validitas Data Variabel X (Efektifitas Hasil Pemasukan Retribusi Rumah Dinas

Sebagai langkah awal dalam pengolahan analisis data kuantitatif maka diperlukan uji validitas terhadap setiap variabel dalam penelitian.

Adapun hasil uji validitas data untuk variabel bebas (X) adalah sebagai berikut:

Correlations

		P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6
P.1	Pearson Correlation	1	.142	.053	.018	-.516**	-.202**
	Sig. (2-tailed)		.057	.483	.815	.000	.007
	N	180	180	180	180	180	180
P.2	Pearson Correlation	.142	1	-.113	-.143	-.096	-.188*
	Sig. (2-tailed)	.057		.130	.056	.199	.012
	N	180	180	180	180	180	180
P.3	Pearson Correlation	.053	-.113	1	.167*	.073	.112
	Sig. (2-tailed)	.483	.130		.025	.328	.134
	N	180	180	180	180	180	180
P.4	Pearson Correlation	.018	-.143	.167*	1	.000	.401**
	Sig. (2-tailed)	.815	.056	.025		.997	.000
	N	180	180	180	180	180	180
P.5	Pearson Correlation	-.516**	-.096	.073	.000	1	.314**
	Sig. (2-tailed)	.000	.199	.328	.997		.000
	N	180	180	180	180	180	180

P.6	Pearson Correlation	-.202**	-.188*	.112	.401**	.314**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.012	.134	.000	.000	
	N	180	180	180	180	180	180
P.7	Pearson Correlation	-.464**	-.068	-.060	-.222**	.705**	-.152*
	Sig. (2-tailed)	.000	.363	.421	.003	.000	.042
	N	180	180	180	180	180	180
JUMLAH	Pearson Correlation	-.177*	-.187*	.150*	.573**	.682**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.018	.012	.045	.000	.000	.000
	N	180	180	180	180	180	180

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P.7	JUMLAH
P.1	Pearson Correlation	-.464**	-.177*
	Sig. (2-tailed)	.000	.018
	N	180	180
P.2	Pearson Correlation	-.068	-.187*
	Sig. (2-tailed)	.363	.012
	N	180	180
P.3	Pearson Correlation	-.060	.150*
	Sig. (2-tailed)	.421	.045
	N	180	180
P.4	Pearson Correlation	-.222**	.573**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000
	N	180	180
P.5	Pearson Correlation	.705**	.682**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000

	N	180	180
P.6	Pearson Correlation	-.152*	.694**
	Sig. (2-tailed)	.042	.000
	N	180	180
P.7	Pearson Correlation	1	.388**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	180	180
JUMLAH	Pearson Correlation	.388**	1
AH	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	180	180

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Hasil Uji validitas Data Variabel Terikat (Y)

Correlations

	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6
P.1 Pearson Correlation	1	-.432**	1.000**	1.000**	.172*	.208**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.021	.005
N	180	180	180	180	180	180
P.2 Pearson Correlation	-.432**	1	-.432**	-.432**	.273**	.244**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001
N	180	180	180	180	180	180
P.3 Pearson Correlation	1.000**	-.432**	1	1.000**	.172*	.208**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.021	.005
N	180	180	180	180	180	180
P.4 Pearson Correlation	1.000**	-.432**	1.000**	1	.172*	.208**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.021	.005
N	180	180	180	180	180	180
P.5 Pearson Correlation	.172*	.273**	.172*	.172*	1	.863**
Sig. (2-tailed)	.021	.000	.021	.021		.000
N	180	180	180	180	180	180
P.6 Pearson Correlation	.208**	.244**	.208**	.208**	.863**	1
Sig. (2-tailed)	.005	.001	.005	.005	.000	

N		180	180	180	180	180	180
P.7	Pearson Correlation	.060	.262**	.060	.060	.915**	.904**
	Sig. (2-tailed)	.421	.000	.421	.421	.000	.000
	N	180	180	180	180	180	180
JUM	Pearson Correlation	.365**	.363**	.365**	.365**	.873**	.933**
LAH	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	180	180	180	180	180	180

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		P.7	JUMLA H
P.1	Pearson Correlation	.060	.365**
	Sig. (2-tailed)	.421	.000
	N	180	180
P.2	Pearson Correlation	.262**	.363**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	180	180
P.3	Pearson Correlation	.060	.365**
	Sig. (2-tailed)	.421	.000
	N	180	180
P.4	Pearson Correlation	.060	.365**
	Sig. (2-tailed)	.421	.000
	N	180	180
P.5	Pearson Correlation	.915**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	180	180
P.6	Pearson Correlation	.904**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000
	N	180	180
P.7	Pearson Correlation	1	.862**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	180	180
JUMLA H	Pearson Correlation	.862**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	

N	180	180
---	-----	-----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Hasil Uji Linearitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.569	8

d. Hasil Uji Linearitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	8

e. Hasil Uji Regresi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.021 ^a	.000	-.005	4.00151

a. Predictors: (Constant), X

Tabel ini menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Adapun nilai R (korelasi) diatas adalah 0,021. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori lemah. Melalui tabel ini juga

diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.243	1	1.243	.078	.781 ^a
	Residual	2850.152	178	16.012		
	Total	2851.394	179			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Tabel ini digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi (Sig). Ketentuannya adalah jika nilai Sig.<0,05 maka model regresi adalah linear. Berdasarkan tabel Anova diatas nilai Sig.0,781 berarti > dari 0,05, jadi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya, model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.109	5.339		4.329	.000
	X	.055	.198	.021	.279	.781

a. Dependent Variable: Y

Tabel ini menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom Unstandardized Coefficients B. Adapun persamaan regresi adalah $Y=a+bx$, jadi persamaan regresi menurut tabel coefficients diatas adalah $Y=23.109+0,055X$.

f. Uji Hipotesis

Berdasarkan output pada tabel diatas nilai signifikansi (sig) sebesar 0,781 lebih besar dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa “Tidak Ada pengaruh retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Begitupun uji hipotesis dengan cara membandingkan nilai T hitung dan dengan T tabel yang mana dasar pengambilan keputusan pada uji hipotesis ini adalah :

1. jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka ada pengaruh efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
2. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka tidak ada pengaruh efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan asli daerah.

Pada hasil penelitian ini diperoleh nilai T hitung sebesar 0,279 sedangkan nilai T tabel sebesar 1,973 jadi nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

g. Uraian Pembahasan

Sekarang ini mekanisme dalam pemungutan Retribusi Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk tata cara pemungutan retribusi

ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah daerah, maka peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena pembiayaan pembangunan sebagian besar akan dibiayai oleh pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi sumber dananya sendiri dan mengelolanya secara efektif dan efisien.

Subjek retribusi rumah dinas adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah dinas dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang memakai jasa usaha penyewaan rumah dinas. Retribusi rumah dinas merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi rumah dinas dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan yang ada di Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.

Adapun besaran retribusi perumahan dinas Kabupaten Barru adalah :

1. Kelas I	Rp. 50.000/bulan
2. kelas II	Rp. 35.000/bulan
3. Kelas III	Rp. 25.500/bulan
4. kelas IV	Rp. 20.000/bulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah dalam aplikasi Statistik SPSS diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kontribusi dari retribusi rumah dinas Pemda Kabupaten Barru menyumbang Rp. 71.106.000,- per tahun ke kas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dengan jumlah bangunan sebanyak 180 unit. Sedangkan pada hasil uji nilai korelasi atau hubungan antara efektifitas retribusi rumah dinas Pemda Kabupaten Barru terhadap Pendapatan Asli Daerah hubungannya sangat lemah hanya 2,1 %, hal ini disebabkan oleh karena fokus penelitian ini hanya berfokus pada retribusi rumah dinas sedangkan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Alat Berat di Kabupaten Barru dan luar Kabupaten Barru.
- b. Retribusi Alat Laboratorium
- c. Retribusi Mess Pemda di Barru
- d. Retribusi Mess Pemda di Jakarta
- e. Retribusi Balai latihan Kerja
- f. Retribusi Gedung/Balai Pertemuan
- g. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air
- h. Retribusi Tempat Pelelangan
- i. Retribusi Pasar
- j. Retribusi Terminal

Adapun faktor penghambat efektifitas kontribusi retribusi rumah dinas adalah kurangnya pemeliharaan fisik bangunan sehingga tidak ada yang menempati atau menyewa rumah dinas tersebut.

Teori Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Halim 2010:47). Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan. Efektifitas yang terkait dengan retribusi maupun perpajakan menurut simanjundak dikutip dari Halim (2010:48).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

- **Kesimpulan**

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Efektifitas Pemasukan Retribusi Rumah Dinas tidak cukup berpengaruh signifikan dimana hasil uji F (Simultan) dan Uji T (Parsial) menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,781

- Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas terhadap pendapatan asli daerah adalah kurangnya pemeliharaan bangunan sedangkan faktor yang mendukung efektifitas pemasukan retribusi rumah dinas meliputi Pemeliharaan, Pemda tidak memperhatikan keluhan rumah, kurangnya Kolektor yang memungut Retribusi, Pengguna Ruah Dinas Tidak tepat Waktu dalam Membayar.

- **Saran**

1. Diperlukan perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap pemeliharaan fisik rumah dinas Pemda Kabupaten Barru sehingga pendapatan yang dipugut retribusi rumah dinas terus mengalami peningkatan.
2. Diperlukan kesadaran dari pengguna jasa rumah dinas Pemda Kabupaten Barru untuk merawat dan menjaga asset Pemda yang ditempati untuk kebaikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2010. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boby Fandhy Putra,dkk.2014.*Jurnal Administrasi Bisnis Volume 10 No. 1*. Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar).Universitas Brawijaya Malang.
- Davey, Kenneth. 2010. Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Amrullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Fernandez, Joe. 2013. Otonomi Daerah Di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta. Jakarta: IPCOS.
- Hamid, Dedi dan Soeaida, Sholeh. Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 dan Pajak Daerah peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001. Jakarta: Asoka Dikta, Darut Bahagia.
- Kaho, Josef, Riwo. 2013. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, M. Dimiyati.2011. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud DIKTI.
- Mamesah, D. J. 2010. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Grafindo.
- Milles, Mathew dan Huberman, A Michael. 2010. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Moenir. 2013. Menejemen Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi aksara.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Fakhziatuddin,dkk.2018.*Jurnal terpublikasi ISSN : 2580-9059 (online)*.Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Syiah Kuala Law Jurnal.
- Mukmin Muhammad,2022,Implementation of Government Regulations On Implementation Of A Busines Entity Owned In Lasalama Village,Balusu In Binuang Village,Balusu Distrtict,Barru Regency (A Study Of Law No. 6 Of 2014 About the Village),Jurnal Scientia, 11(02),241-246 Retrieved from <http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/837>
- Mukmin Muhammad,Kamaruddin Hasan, & Rismah,2022,Implementation Of Law, No. 16 Of 2019 Concerning Marriage In Effort To Prevent Early Child Marriage In

- the Office Of Religions Affairs,Balusu Districk,Barru Regency,Jurnal Scientia, 11 (01),691-700,<https://doi.org/10.35337/scientia.Vol11.pp691-700>
- Novia Cynthia Maradesa,dkk.2016.*Jurnal Berkala Ilmiah Volume 16 No. 03*. Analisis Efektivitas Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Kepulauan Talaud.Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rachman, Maman. 2010. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Press.
- Saban Echdar.H.2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*.Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sarudajang, S.H. 2012. Birokasi dalam Otonomi Daerah; Upaya mengatasi keagalannya. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiono.(2012).Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Alfabeta.Bandung.
- Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid. 2012. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab,Solichin Abdul. 2010. Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif Dan Berkualitas. Malang: Universitas Brawijaya Program Pasca Sarjana.
- Widjaja,A.W. 2010. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II . Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Semarang: Diperbanyak oleh CV. Duta Nusindo.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Semarang: Diperbanyak oleh CV. Duta Nusindo.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha